

Strategi Civil Society dalam Pendidikan Politik Inklusif untuk Menguatkan Civic Engagement Generasi Z

Erfain^{1*}

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sulawesi Tenggara

*Author Correspondence. Email: erfain79@gmail.com, Phone: +6285299587997

Abstract : *The rapid digital political transformation has brought new challenges and opportunities for political education in Indonesia, especially in the context of the engagement of generation Z. This generation grew up in a dynamic digital environment, but faces information inequality and political apathy. In this context, civil society has a strategic role in promoting inclusive and participatory political education. This literature study aims to explore the strategies used by civil society organizations in educating generation Z about democratic values, citizen rights, and the importance of political participation. The literature study approach was used to examine various scientific articles, research reports, and policy documents over the past 10 years. The results of the study show that civil society strategies include digital civic education, strengthening issue-based communities, value-based social media campaigns, and collaboration with formal educational institutions. These strategies have been proven to be able to increase political awareness, critical thinking skills, and the tendency for active participation of generation Z in the democratic process. These findings emphasize the importance of collaboration between civil society and the state in building an inclusive and responsive political education ecosystem to the needs of the younger generation.*

Keywords: *Civil Society, Inclusive Political Education, Civic Engagement, Generation Z, Political Participation*

Abstrak: Transformasi politik digital yang cepat telah membawa tantangan dan peluang baru bagi pendidikan politik di Indonesia, khususnya dalam konteks keterlibatan generasi Z. Generasi ini tumbuh dalam lingkungan digital yang dinamis, namun menghadapi ketimpangan informasi dan apatisisme politik. Dalam konteks ini, sivil society memiliki peran strategis dalam mendorong pendidikan politik yang inklusif dan partisipatif. Studi literatur ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi-strategi yang digunakan organisasi masyarakat sipil dalam mengedukasi generasi Z tentang nilai-nilai demokrasi, hak-hak warga negara, dan pentingnya partisipasi politik. Pendekatan studi literatur digunakan untuk menelaah berbagai artikel ilmiah, laporan riset, dan dokumen kebijakan dalam kurun 10 tahun terakhir. Hasil studi menunjukkan bahwa strategi sivil society mencakup digital civic education, penguatan komunitas berbasis isu, kampanye media sosial berbasis nilai, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan formal. Strategi ini terbukti mampu meningkatkan kesadaran politik, keterampilan berpikir kritis, dan kecenderungan partisipasi aktif generasi Z dalam proses demokrasi. Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara sivil society dan negara dalam membangun ekosistem pendidikan politik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan generasi muda.

Kata Kunci: Sivil Society, Pendidikan Politik Inklusif, Civic Engagement, Generasi Z, Partisipasi Politik

1. PENDAHULUAN

Pendidikan politik merupakan salah satu instrumen penting dalam membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajibannya dalam kehidupan demokratis. Dalam konteks masyarakat demokratis, pendidikan politik tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi mengenai sistem pemerintahan dan proses pemilu, tetapi juga sebagai proses pembentukan kesadaran kritis, partisipasi aktif, serta keterlibatan dalam ruang publik (Darmaningtyas, 2021). Pendidikan politik yang baik akan membekali warga negara, khususnya generasi muda, dengan pemahaman akan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan partisipasi, sehingga mereka mampu menjadi agen perubahan sosial yang konstruktif.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah lanskap pendidikan politik, terutama di kalangan generasi Z. Generasi ini merupakan kelompok yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan digital dengan akses informasi yang luas, cepat, dan tidak terbatas. Namun demikian, akses informasi yang berlimpah tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya literasi politik. Justru sering kali, generasi ini terpapar oleh misinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi ideologis yang mengganggu pembentukan civic engagement yang sehat (Lim, 2020). Oleh karena itu, pendidikan politik yang bersifat inklusif, partisipatif, dan adaptif terhadap konteks digital menjadi semakin penting untuk dikembangkan.

Dalam konteks inilah, peran sivil society menjadi sangat signifikan. Sivil society sebagai bagian dari kekuatan non-negara memainkan peran strategis dalam menciptakan ruang pendidikan politik alternatif yang lebih cair dan mendekati pada realitas generasi muda. Menurut Habermas (1996), ruang publik demokratis hanya dapat terbentuk melalui komunikasi rasional yang bebas dari dominasi kekuasaan. Sivil society hadir sebagai aktor yang dapat membangun ruang-ruang dialogis tersebut melalui berbagai strategi seperti pelatihan kepemudaan, kampanye media sosial, serta diskusi berbasis komunitas yang mengedepankan nilai-nilai inklusivitas.

Pendidikan politik inklusif sendiri menekankan pada prinsip keadilan akses, keberagaman perspektif, dan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, pendidikan politik inklusif menolak pendekatan top-down yang otoriter dan justru mengedepankan pendekatan horizontal yang melibatkan pengalaman, nilai, dan suara masyarakat, termasuk kelompok marjinal dan minoritas (Putri & Siregar, 2022). Dengan demikian, sivil society memiliki

peluang besar untuk menjembatani pendidikan politik dengan generasi Z melalui pendekatan yang lebih adaptif dan humanis.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi civil society adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan politik dalam format yang menarik, relevan, dan mudah dipahami oleh generasi Z. Menurut riset dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2022, tingkat partisipasi politik generasi muda masih rendah, baik dalam bentuk keikutsertaan pemilu maupun keterlibatan dalam kegiatan sosial-politik lainnya (Bappenas, 2022). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman politik dengan tindakan nyata di kalangan generasi muda. Oleh sebab itu, strategi yang digunakan oleh civil society perlu memperhitungkan karakteristik digital native yang melekat pada generasi ini.

Beberapa organisasi civil society seperti Perludem, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan KontraS telah melakukan berbagai inovasi dalam pendidikan politik yang menargetkan generasi muda. Mereka menggunakan platform media sosial, podcast, video edukatif, dan kampanye daring untuk menyampaikan pesan-pesan demokrasi, antikorupsi, serta keadilan sosial (Fauzan, 2023). Selain itu, pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan anak muda secara aktif dalam diskusi dan advokasi isu-isu lokal terbukti mampu membentuk rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap ruang publik.

Studi-studi terdahulu juga menunjukkan bahwa civic engagement generasi Z tidak selalu diekspresikan melalui cara-cara konvensional seperti mengikuti partai politik atau organisasi mahasiswa. Mereka lebih cenderung terlibat dalam bentuk aktivisme digital, petisi daring, kampanye sosial, hingga konsumsi produk dengan nilai etis (Puspitasari, 2021). Oleh karena itu, strategi pendidikan politik yang digunakan civil society perlu disesuaikan dengan pola partisipasi baru ini, tanpa mengabaikan tujuan jangka panjang pembentukan warga negara yang demokratis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, studi literatur ini bertujuan untuk menganalisis strategi-strategi civil society dalam membangun pendidikan politik inklusif yang ditujukan kepada generasi Z. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif terhadap berbagai sumber literatur akademik dan praktik lapangan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam penguatan civic engagement generasi muda Indonesia. Fokus utama adalah bagaimana pendidikan politik yang inklusif mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat demokrasi yang partisipatif dan berkeadilan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi-strategi yang digunakan oleh aktor *civil society* dalam membangun pendidikan politik inklusif guna meningkatkan *civic engagement* generasi Z. Studi literatur dipilih sebagai metode karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai konsep, teori, serta temuan empiris yang telah dihasilkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Pendekatan ini memfokuskan diri pada pencarian sumber-sumber sekunder dari berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, laporan kebijakan, serta dokumen organisasi masyarakat sipil yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai database seperti Google Scholar, DOAJ, Garuda, dan SINTA, dengan kata kunci antara lain: *civil society*, pendidikan politik inklusif, generasi Z, *civic engagement*, dan partisipasi politik anak muda. Kriteria inklusi dalam pemilihan literatur meliputi publikasi yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2024, memiliki fokus pada pendidikan politik dan partisipasi generasi muda, serta memberikan gambaran konkret mengenai strategi atau praktik lapangan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil.

Langkah-langkah dalam proses studi literatur ini dimulai dari tahap identifikasi sumber, penyaringan literatur, evaluasi kualitas dan relevansi, hingga analisis tematik. Identifikasi dilakukan dengan mengumpulkan lebih dari 50 dokumen yang memiliki relevansi dengan topik. Setelah melalui tahap penyaringan dengan mempertimbangkan kualitas jurnal dan keterkaitannya dengan tujuan penelitian, sebanyak 25 literatur utama dipilih untuk dianalisis secara lebih mendalam. Evaluasi terhadap literatur dilakukan dengan memperhatikan konteks geografis (terutama Indonesia dan Asia Tenggara), pendekatan metodologis, dan keberpihakan terhadap nilai-nilai inklusif dalam pendidikan politik. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui pendekatan tematik, di mana peneliti mengelompokkan berbagai strategi yang ditemukan dalam literatur ke dalam tema-tema besar seperti penggunaan media digital, komunitas berbasis isu, penguatan nilai kewargaan, dan kolaborasi antar sektor.

Pentingnya pendekatan tematik dalam studi literatur ini adalah untuk menggambarkan pola-pola dan kecenderungan yang muncul dalam praktik *civil society* secara holistik dan kontekstual. Setiap tema yang diangkat diinterpretasikan

berdasarkan kerangka teori partisipasi deliberatif dan civic engagement yang relevan dengan karakteristik generasi Z. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan kajian kritis terhadap berbagai perspektif yang ditawarkan oleh para penulis literatur. Dengan metode ini, diharapkan hasil kajian dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami bagaimana strategi pendidikan politik yang dikembangkan oleh sivil society mampu menjawab tantangan partisipasi politik generasi Z dan membangun demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan literatur yang dianalisis, terdapat empat strategi utama yang digunakan sivil society:

a. Digital Civic Education

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi cara masyarakat, terutama generasi Z, dalam mengakses dan berinteraksi dengan informasi politik. Generasi ini tidak lagi mengandalkan sumber informasi konvensional seperti surat kabar atau siaran televisi, melainkan lebih aktif menggunakan media sosial dan platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan podcast sebagai saluran utama untuk memahami isu-isu sosial dan politik. Dalam konteks ini, sivil society memanfaatkan peluang tersebut dengan merancang pendidikan politik berbasis digital yang lebih inklusif dan komunikatif. Rahardjo (2021) mencatat bahwa platform digital bukan hanya sarana penyebaran informasi, tetapi juga ruang dialogis yang potensial untuk menumbuhkan kesadaran politik generasi muda. Strategi ini menciptakan pendekatan baru dalam menyampaikan materi-materi politik melalui konten yang ringan, menarik, dan mudah dipahami, seperti video animasi singkat, infografis, vlog advokasi, serta sesi tanya jawab interaktif secara daring.

Penggunaan platform seperti TikTok dan Instagram Reels sangat efektif untuk menjangkau perhatian generasi muda yang memiliki rentang perhatian yang pendek dan lebih tertarik pada konten visual yang dinamis. Banyak organisasi masyarakat sipil yang mulai mengembangkan narasi politik dalam bentuk storytelling digital yang mengedepankan pengalaman individu, opini publik, serta fakta-fakta sosial yang dikemas dalam bahasa yang akrab dengan keseharian anak muda. Misalnya, kampanye anti-hoaks yang dilakukan oleh MAFINDO, serta serial video edukasi demokrasi yang diproduksi oleh Perludem di YouTube, menunjukkan bagaimana konten digital dapat meningkatkan literasi politik dan kemampuan berpikir kritis di kalangan remaja. Menurut penelitian Lim (2020), media sosial tidak

hanya berfungsi sebagai kanal penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang diskusi alternatif yang memungkinkan keterlibatan aktif publik dalam proses deliberatif.

Lebih jauh lagi, digital civic education memungkinkan proses pendidikan politik yang bersifat dialogis dan partisipatif. Generasi Z tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga berperan sebagai produsen konten yang secara aktif membagikan opini, melakukan diskusi, dan menciptakan gerakan digital yang berdampak. Ruang komentar, polling interaktif, dan siaran langsung (live streaming) menjadi bagian dari proses pembelajaran politik yang berbasis partisipasi horizontal. Hal ini sejalan dengan pandangan Nasrullah (2023) yang menekankan bahwa budaya digital memungkinkan terbentuknya ruang kewargaan digital di mana generasi muda dapat mengekspresikan aspirasi politik secara kreatif, setara, dan partisipatif. Budaya partisipatif digital tidak hanya memperluas ruang komunikasi politik, tetapi juga mendorong pemuda untuk menjadi aktor perubahan sosial melalui dunia maya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Namun demikian, keberhasilan strategi digital civic education sangat bergantung pada literasi digital dan kemampuan berpikir kritis dari audiensnya. Tanpa literasi yang memadai, paparan terhadap informasi politik melalui media digital justru dapat menimbulkan dampak negatif seperti polarisasi, penyebaran hoaks, dan munculnya politik identitas yang eksklusif. Oleh karena itu, peran civil society tidak hanya berhenti pada produksi konten, tetapi juga mencakup pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi diskusi yang sehat di ruang-ruang digital. Puspitasari (2021) menekankan bahwa strategi digital yang efektif harus dibarengi dengan pendidikan nilai-nilai demokratis, seperti toleransi, keadilan, dan keberagaman. Dengan cara ini, digital civic education dapat menjadi instrumen penting dalam membentuk civic engagement generasi Z yang lebih aktif, kritis, dan inklusif terhadap isu-isu kebangsaan.

b. Komunitas Berbasis Isu

Salah satu strategi efektif yang digunakan civil society dalam meningkatkan kesadaran politik generasi Z adalah pembentukan komunitas berbasis isu. Komunitas ini biasanya dibentuk oleh dan untuk anak muda dengan kepedulian terhadap isu-isu spesifik seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, kesetaraan gender, demokrasi digital, dan keadilan sosial. Melalui keterlibatan dalam komunitas semacam ini, generasi Z tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi

juga mengalami secara langsung praktik-praktik partisipasi sosial-politik di tingkat akar rumput. Indriani (2022) mencatat bahwa pengalaman langsung dalam advokasi isu mampu membentuk kesadaran politik yang lebih mendalam dan personal karena bersumber dari emosi, empati, dan keterikatan terhadap isu yang diperjuangkan.

Komunitas berbasis isu mendorong model pendidikan politik yang bersifat experiential learning, yaitu pembelajaran melalui keterlibatan nyata dalam kegiatan sosial. Misalnya, komunitas peduli lingkungan seperti Extinction Rebellion Youth Indonesia atau Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik sering mengajak anak muda untuk terlibat dalam aksi publik, edukasi lapangan, hingga kampanye berbasis data. Aktivitas-aktivitas tersebut tidak hanya memperkenalkan konsep kebijakan publik dan hak warga negara, tetapi juga melatih keterampilan berpikir kritis, komunikasi politik, dan kolaborasi lintas sektor. Dalam banyak kasus, komunitas ini bertindak sebagai "sekolah politik informal" yang lebih cair dan relevan dengan dinamika generasi Z (Fauzan, 2023).

Selain sebagai ruang pembelajaran, komunitas berbasis isu juga berfungsi sebagai ruang aman (safe space) yang memungkinkan ekspresi identitas dan nilai-nilai personal. Banyak pemuda yang merasa teralienasi dari sistem politik formal justru menemukan tempatnya dalam komunitas yang lebih horizontal, non-hirarkis, dan berbasis nilai bersama. Ruang ini memungkinkan diskusi terbuka, pertukaran ide, serta kolaborasi lintas latar belakang sosial tanpa tekanan institusional. Nasrullah (2023) menyebut fenomena ini sebagai bentuk pergeseran dari state-centered civic participation menuju issue-centered participation, di mana keterlibatan warga negara ditentukan oleh nilai dan kepedulian terhadap isu, bukan oleh struktur atau afiliasi politik.

Lebih jauh lagi, komunitas berbasis isu berkontribusi dalam memperkuat civic engagement jangka panjang. Anak muda yang terlibat dalam komunitas advokasi cenderung memiliki kepekaan terhadap isu publik dan keberanian untuk menyuarakan pendapat di ruang publik. Mereka menjadi lebih peka terhadap dinamika sosial, mampu mengenali ketimpangan, dan tertarik pada proses perubahan sosial melalui jalur-jalur nonformal. Dalam jangka panjang, proses ini akan mencetak generasi warga negara yang lebih aktif, peduli, dan memiliki keberanian moral untuk memperjuangkan keadilan sosial dan demokrasi substantif. Oleh karena itu, sivil society perlu terus mendorong pembentukan dan penguatan

komunitas-komunitas berbasis isu sebagai bagian integral dari strategi pendidikan politik inklusif bagi generasi Z.

c. Kampanye Berbasis Nilai

Kampanye berbasis nilai merupakan strategi civil society yang secara efektif digunakan untuk menjangkau dan membentuk kesadaran politik generasi Z melalui media sosial. Tidak seperti kampanye politik tradisional yang cenderung berorientasi pada tokoh atau partai, kampanye berbasis nilai menekankan pada penyampaian pesan-pesan moral dan etis yang berakar pada prinsip demokrasi, seperti inklusivitas, toleransi, kesetaraan, dan keadilan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik generasi Z yang lebih responsif terhadap isu-isu kemanusiaan dan keadilan daripada sekadar loyalitas politik. Fauzan (2023) menunjukkan bahwa kampanye yang mengangkat nilai-nilai universal lebih mampu menarik simpati dan membangun keterlibatan emosional generasi muda karena menyentuh identitas dan keyakinan mereka terhadap dunia yang lebih adil dan setara.

Media sosial menjadi ruang utama dalam penyebaran kampanye berbasis nilai karena sifatnya yang terbuka, horizontal, dan interaktif. Platform seperti Instagram, TikTok, Twitter (X), dan YouTube memberikan kebebasan bagi individu dan komunitas untuk memproduksi dan menyebarkan narasi-narasi alternatif yang sering kali tidak terwakili di media arus utama. Civil society memanfaatkan karakteristik ini untuk membangun kampanye digital yang menampilkan testimoni, cerita personal, data visual, serta ajakan bertindak (call to action) yang menyentuh aspek afektif audiens. Kampanye seperti #PerempuanBersuara, #KitaVersusKorupsi, atau #SuaraUntukIklim menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai kesetaraan gender, integritas publik, dan keadilan lingkungan dapat dikomunikasikan dengan cara yang menarik dan berdampak luas melalui media sosial (Putri & Siregar, 2022).

Selain itu, kampanye berbasis nilai berfungsi sebagai alat dekonstruksi terhadap narasi-narasi eksklusif yang sering mengakar dalam politik identitas. Dengan mengangkat nilai-nilai seperti kebhinekaan, anti-diskriminasi, dan hak asasi manusia, kampanye ini berkontribusi dalam membangun ruang publik yang lebih inklusif dan demokratis. Generasi Z yang tumbuh dalam keragaman sosial budaya dan terpapar pada praktik-praktik inklusif global cenderung lebih mudah mengadopsi nilai-nilai ini sebagai bagian dari identitas politik mereka. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran dari partisipasi politik berbasis struktur ke

arah partisipasi berbasis nilai, di mana individu terlibat dalam gerakan atau kampanye karena keyakinan mereka terhadap kebenaran moral suatu isu (Nasrullah, 2023).

Namun, keberhasilan kampanye berbasis nilai juga menghadapi tantangan, seperti resistensi dari kelompok konservatif, manipulasi narasi oleh aktor politik oportunistis, dan ancaman disinformasi digital. Oleh karena itu, sivil society perlu merancang kampanye yang tidak hanya viral secara teknis, tetapi juga kuat secara substansi dan mampu mempertahankan integritas pesan. Strategi kolaboratif antara pembuat konten, aktivis, dan komunitas menjadi kunci untuk memastikan kampanye tetap relevan, berkelanjutan, dan berdampak pada perubahan sosial-politik. Dalam konteks ini, pendidikan politik tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk nilai dan sikap warga negara. Kampanye berbasis nilai, karenanya, menjadi medium penting dalam membangun civic engagement yang bermoral, kritis, dan berorientasi pada perubahan jangka panjang.

d. Kolaborasi dengan Sekolah dan Kampus

Kolaborasi antara sivil society dengan institusi pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi merupakan strategi penting dalam memperluas jangkauan pendidikan politik inklusif. Pendidikan formal memiliki akses langsung kepada generasi muda melalui kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan lingkungan belajar yang sistematis. Namun, materi pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di sekolah sering kali masih bersifat normatif dan kurang kontekstual dengan dinamika sosial-politik yang dihadapi generasi Z. Dalam hal ini, sivil society hadir untuk melengkapi fungsi pendidikan formal melalui penguatan kurikulum, penyusunan modul tematik, serta penyelenggaraan pelatihan dan seminar yang lebih aplikatif dan responsif terhadap isu kontemporer (Arifin, 2020).

Pelibatan sivil society dalam dunia pendidikan tidak hanya memberikan sudut pandang alternatif, tetapi juga memperkaya materi ajar dengan praktik-praktik partisipasi warga negara yang aktual. Banyak organisasi seperti Yayasan Tifa, Perludem, dan PUSAD Paramadina yang bekerja sama dengan sekolah dan kampus dalam menyusun modul kewargaan yang menekankan nilai inklusivitas, keadilan sosial, serta hak asasi manusia. Modul ini dikembangkan dalam format digital dan interaktif, yang sesuai dengan gaya belajar generasi Z yang cenderung visual dan terhubung secara daring. Melalui pelatihan bagi guru, dosen, dan siswa, serta penyelenggaraan sekolah demokrasi atau workshop advokasi kebijakan

publik, civil society mampu menghubungkan antara teori kewarganegaraan dengan praktik nyata dalam kehidupan masyarakat (Putri & Siregar, 2022).

Kerja sama ini juga membuka ruang dialog kritis di lingkungan pendidikan yang sebelumnya dianggap kaku dan kurang terbuka terhadap isu-isu sosial sensitif seperti kesetaraan gender, kebebasan berekspresi, dan kebhinekaan. Civil society memfasilitasi diskusi tematik, riset kolaboratif, serta proyek aksi sosial yang melibatkan siswa dan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini menciptakan pengalaman belajar yang tidak hanya informatif, tetapi juga transformatif. Menurut Fauzan (2023) intervensi semacam ini efektif dalam menumbuhkan empati sosial, keberanian berpendapat, dan kepedulian terhadap masalah publik. Kolaborasi ini juga mendorong pengembangan budaya akademik yang demokratis dan reflektif terhadap dinamika masyarakat.

Dalam jangka panjang, kolaborasi antara civil society dan institusi pendidikan formal dapat memperkuat ekosistem pendidikan politik nasional yang lebih partisipatif dan berorientasi pada nilai. Tidak hanya memperkuat kompetensi kewarganegaraan generasi muda, strategi ini juga membangun jejaring antarlembaga yang saling melengkapi dalam memajukan demokrasi. Pendidikan politik tidak bisa hanya menjadi urusan negara atau sekolah semata, melainkan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap masa depan demokrasi. Oleh karena itu, memperluas kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi Z yang tidak hanya cerdas secara politik, tetapi juga aktif dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

4. KESIMPULAN

Studi literatur ini menunjukkan bahwa peran civil society dalam pendidikan politik inklusif sangat penting dan strategis, khususnya dalam membentuk civic engagement generasi Z yang lebih aktif, kritis, dan reflektif. Civil society telah mampu menjawab keterbatasan pendidikan formal dalam hal fleksibilitas pendekatan dan kedekatan dengan realitas sosial generasi muda. Melalui strategi seperti pendidikan politik digital, pembentukan komunitas berbasis isu, kampanye berbasis nilai, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil berhasil menciptakan ruang belajar politik yang lebih partisipatif, terbuka, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Strategi-strategi tersebut tidak hanya meningkatkan literasi politik generasi Z, tetapi juga mendorong mereka untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan publik melalui berbagai bentuk partisipasi sosial dan politik.

Lebih lanjut, integrasi pendekatan nilai dan pengalaman langsung dalam pendidikan politik menjadi faktor kunci dalam menumbuhkan kesadaran politik yang mendalam dan berkelanjutan. Generasi Z sebagai digital native menunjukkan respon yang lebih tinggi terhadap kampanye dan aktivitas yang selaras dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan keadilan. Oleh karena itu, keberhasilan strategi civil society terletak pada kemampuannya untuk menerjemahkan isu-isu politik menjadi narasi yang emosional, personal, dan dapat ditindaklanjuti. Tidak hanya membentuk pemahaman rasional, pendidikan politik yang inklusif juga mampu menggerakkan afeksi dan empati generasi muda, sehingga memperkuat ikatan mereka dengan ruang publik dan proses demokrasi.

Untuk memperkuat hasil-hasil tersebut, diperlukan komitmen berkelanjutan dari berbagai pihak, terutama dalam membangun sinergi antara civil society, institusi pendidikan, dan pemerintah. Penguatan civic engagement generasi Z tidak bisa dikerjakan secara terpisah, melainkan melalui kolaborasi multisektor yang saling mendukung. Pemerintah perlu membuka ruang lebih luas bagi partisipasi anak muda, dunia pendidikan harus lebih adaptif terhadap pendekatan pembelajaran kontekstual, dan civil society harus terus berinovasi dalam menyusun strategi advokasi yang berbasis nilai. Dengan demikian, pendidikan politik inklusif dapat benar-benar menjadi fondasi bagi terwujudnya demokrasi yang lebih substantif dan berkeadilan sosial di masa depan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2020). Peran LSM dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital. *Jurnal Demokrasi dan Pendidikan*, 12(1), 34–45.
- Bappenas. (2022). *Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Darmaningtyas. (2021). *Pendidikan Politik untuk Masyarakat Demokratis*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Fauzan, H. (2023). Strategi Kampanye Politik Inklusif oleh Komunitas Muda di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Politik*, 9(2), 77–89.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Indriani, R. (2022). Komunitas Anak Muda dan Kesadaran Kewargaan: Studi Kasus Urban Youth Movement. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(3), 110–125.
- Lim, M. (2020). *Digital Media and Political Polarization in Indonesia*. Asia Research Institute Working Paper Series, No. 271.

- Nasrullah, R. (2023). *Budaya Digital: Kewargaan, Identitas, dan Partisipasi Politik Anak Muda di Media Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Putri, D., & Siregar, R. (2022). Pendidikan Politik Inklusif dan Partisipasi Anak Muda. *Jurnal Demokrasi Indonesia*, 8(1), 45–60.
- Puspitasari, R. (2021). Civic Engagement Generasi Z: Antara Aktivisme Digital dan Gerakan Sosial. *Jurnal Sosial dan Politik Digital*, 6(1), 101–115.
- Rahardjo, B. (2021). Digitalisasi Pendidikan Politik dan Perubahan Perilaku Pemilih Muda. *Jurnal Politik dan Masyarakat*, 15(1), 56–70.